

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

DKI Jakarta di kenal dengan jumlah penduduknya yang banyak dari tahun ke tahun dan akan selalu meningkat. Peningkatan jumlah penduduk di DKI Jakarta ini terjadi karena masyarakat di berbagai daerah datang ke Ibukota Jakarta untuk mengadu nasib atau peruntungannya di Jakarta yang diharapkan setelah masyarakat datang ke Jakarta akan mengubah kehidupannya.<sup>1</sup> Perpindahan masyarakat dari daerah ke Ibukota Jakarta memiliki dampak yang buruk bagi lingkungan hidup karena dalam hal ini masyarakat membuat bangunan-bangunan liar yang seiring berkembangnya waktu dan kondisi dapat berubah menjadi permukiman liar yang ada di sempadan sungai. Sungai di Daerah Ibukota Jakarta itu sendiri terdiri dari 13 sungai yang salah satunya adalah sungai Ciliwung.

Terjadinya permukiman liar di sempadan sungai di karenakan masyarakat yang datang ke DKI Jakarta tidak memiliki kerabat dekat atau teman dan rata-rata masyarakat yang tinggal di sempadan sungai berpenghasilan rendah yang pada akhirnya masyarakat tersebut memberanikan diri untuk mendirikan permukiman liar atau kumuh di sempadan sungai tepatnya di sungai Ciliwung, adanya permukiman di sempadan sungai bukan merupakan suatu hal yang baru yang ada di DKI Jakarta. Karena di beberapa daerah juga ada yang mendirikan bangunan

---

<sup>1</sup> <http://dispusip.jakarta.go.id/?p=4107>, diakses tanggal 29 Agustus 2018.

perumahan di sempadan sungai yang nantinya semakin bertambah dan akan menimbulkan banyaknya permukiman liar. Jika dilihat dari aspek hukumnya sebenarnya permukiman liar tidak diperbolehkan karena pada dasarnya garis sempadan pada sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditentukan bahwa paling sedikit 10 m (sepuluh meter) dengan kedalaman 3 m (tiga meter), paling sedikit 15 m (lima belas meter) dengan kedalaman 3m (tiga meter) sampai dengan 20 m (dua puluh meter) dan paling sedikit 30 m (tiga puluh meter) dengan kedalaman sungai 20 m (dua puluh meter) dari tepi kanan kiri palung sungai dan untuk garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit jarak antara daratan dengan sungai adalah 3 m (tiga meter) dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 huruf (a), (b), (c) dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai. Jika dilihat secara seksama maka permukiman liar di sempadan sungai telah menyalahi aturan karena permukiman liar tersebut berdekatan dengan sempadan sungai bahkan dalam praktek atau kenyataannya permukiman liar tersebut berada di atas sungai. Semakin banyaknya permukiman liar akan menimbulkan dampak bagi lingkungan hidup walaupun dampak dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu dampak negatif dan dampak positif tetapi dalam hal ini apabila terus meningkat bangunan permukiman liar di sempadan sungai maka akan menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan hidup, masyarakat dan sungai itu sendiri.

Jika permukiman di sempadan sungai maupun di atas sungai Ciliwung yang sebenarnya tidak diperbolehkan tetapi tetap ada dan semakin bertambah maka akan menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan bagi lingkungan hidup yang

diakibatkan dari adanya permukiman liar, masyarakat yang membuang sampah sembarangan, mencuci pakaian di sungai dengan menggunakan deterjen, pewangi, dan lain-lainnya atau dapat dikategorikan limbah B3, dan ada juga permasalahan pencemaran yang timbul dari tidak adanya pengelolaan limbah pembuangan septitanck yang semestinya dalam hal ini harus dikelola terlebih dahulu sebelum dibuang ke sungai tetapi pada prakteknya pembuangan limbah septitanck langsung dibuang ke sungai menyebabkan resiko pencemaran terhadap lingkungan hidup semakin meningkat. Kegiatan yang dilakukan masyarakat ini telah mempengaruhi alam itu sendiri yang dapat memberikan kerugian bagi lingkungan hidup, memang dalam hal ini permukiman sangatlah penting bagi masyarakat agar dapat memiliki tempat tinggal sebagai identitas dirinya tetapi tidak dapat dibenarkan apabila mendirikan permukiman liar di sempadan sungai.

Pemerintah dalam hal ini memiliki peran yang sangatlah penting untuk mengendalikan pencemaran lingkungan terhadap sungai serta memberikan perlindungan terhadap sungai itu sendiri tetapi pada kenyataanya Pemerintah belum mampu mengatasi permasalahan-permasalahan terhadap lingkungan hidup khususnya dalam hal ini pencemaran sungai akibat dari permukiman liar. Pemerintah semestinya dapat menertibkan permukiman liar di sempadan sungai Ciliwung yang dalam hal ini berguna untuk mengembalikan fungsi dari sempadan sungai itu sendiri dan mencegah terjadinya pencemaran yang di akibatkan dari banyaknya permukiman liar. Maka jika dilihat dari latar belakang ini sangat penting untuk dilakukannya penelitian mengenai Aspek Hukum Perlindungan Sungai Ciliwung dari Pencemaran Akibat Permukiman Liar.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah aspek Hukum perlindungan sungai Ciliwung dari pencemaran akibat permukiman liar?
2. Apa saja kendala dan solusi bagi perlindungan sungai Ciliwung dari pencemaran akibat permukiman liar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui aspek hukum perlindungan sungai Ciliwung dari pencemaran akibat permukiman liar.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi bagi perlindungan sungai Ciliwung dari pencemaran akibat permukiman liar.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat dari adanya penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan adanya penemuan hukum yang lain dalam bidang lingkungan hidup untuk melakukan perlindungan terhadap sungai itu sendiri

dan mencegah agar tidak terjadinya pencemaran yang diakibatkan dari adanya permukiman liar di sungai.

2. Secara praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi tambahan dalam bidang hukum dalam hal tentang Lingkungan Hidup bagi:

- a. Bagi Dinas Lingkungan Hidup untuk lebih peduli terhadap lingkungan hidup agar dapat melakukan pengendalian pencemaran karena lingkungan merupakan suatu hal yang penting yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat dan sebagai acuan untuk menambah program yang dapat dikembangkan lagi untuk memberikan kesadaran terhadap pentingnya kebersihan dalam suatu lingkungan hidup.
- b. Bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk lebih sadar dan peduli bahwa masih banyak masyarakat ekonomi rendah yang tidak memiliki tempat tinggal yang layak sehingga mendirikan permukiman di sungai.
- c. Bagi Satpol PP untuk lebih memberikan kesadaran dan ikut berkontribusi dalam membantu penegakan hukum bangunan permukiman liar atau kumuh agar terciptanya lingkungan hidup yang sehat.
- d. Bagi Akademisi dapat sebagai acuan atau bahan pengajaran untuk mengkaji mengenai arti pentingnya sebuah aspek hukum perlindungan terhadap sungai dan untuk dapat menjalankan atau membantu melakukan pengendalian pencemaran akibat dari adanya permukiman liar atau kumuh.

- e. Bagi masyarakat adanya penelitian ini agar masyarakat yang mendirikan bangunan permukiman di sempadan sungai dapat memiliki pengetahuan dan kesadaran yang lebih baik untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik daripada sebelumnya agar sungai dapat di fungsikan sebagaimana semestinya.
- f. Bagi penulis sendiri sebagai dasar untuk menambah ilmu dan menghargai arti penting dari sebuah Lingkungan Hidup.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian dengan judul: “ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN SUNGAI CILIWUNG DARI PENCEMARAN AKIBAT PERMUKIMAN LIAR.” Penulisan ini merupakan keaslian penelitian tidak ada plagiasi, kekhususan dari adanya penulisan ini adalah membahas mengenai aspek hukum perlindungan sungai Ciliwung dari pencemaran akibat permukiman liar. Berkaitan dengan tema penulisan ini sebelumnya belum pernah dijadikan tema penulisan sebagaimana yang diuraikan di bawah ini:

1. Alfonsius Beni Nugroho, NPM: 130511332, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016, Judul: ASPEK HUKUM TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR BANTARGEBAK BEKASI, Rumusan Masalahnya:
  - a. Bagaimana aspek hukum tanggung jawab Pemerintah Daerah DKI Jakarta dan Kota Bekasi dalam pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir Bantergebak Bekasi.

- b. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir Bantargebang Bekasi.

Hasil Penelitiannya sebagai berikut: pengelolaan sampah di TPA di Bantargebang dimiliki oleh swakelola Provinsi DKI Jakarta yang dulunya di kelola oleh perusahaan swasta dalam hal ini yang melakukan pengelolaan sampah di TPA bukan hanya saja Provinsi DKI Jakarta melainkan juga dengan Pemerintah Kota Bekasi. Kesulitan yang dihadapi dalam melakukan pengelolaan sampah di TPA karena banyaknya pemulung, kurangnya alat berat untuk melakukan pengangkutan sampah, dan kurangnya penyemprotan desifektan untuk mencegah terjadinya penyakit.

2. Nita Prawita, NPM: 080509849, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2012, Judul: PENGGUNAAN TANAH UNTUK RUMAH TINGGAL DI SEMPADAN SUNGAI CODE DALAM KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN FUNGSI RUANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NO. 2 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA YOGYAKARTA, Rumusan Masalahnya:

Apakah penggunaan tanah untuk rumah tinggal di sempadan Sungai Code telah mewujudkan perlindungan fungsi ruang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029.

Hasil Penelitiannya: bahwa adanya perumahan di sempadan sungai Code belum mewujudkan perlindungan fungsi ruang sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 100 Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2010 sempadan sungai, yang dalam hal ini sungai Code merupakan kawasan lindung untuk menjaga kelestarian fungsi sungai itu sendiri.

3. Tedy Verdyanto Kurniawan, NPM: 100510347, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2017, Judul: PERAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGENDALIAN PENCEMARAN SUNGAI BENGAWAN SOLO DI KABUPATEN SUKAHARJO, Rumusan Masalahnya:

- a. Bagaimana peran Badan Lingkungan Hidup (BLH) dalam pengendalian pencemaran sungai Bengawan Solo di Kabupaten Sukaharjo.
- b. Apakah kendala yang dihadapi oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) dalam pengendalian pencemaran sungai Bengawan Solo di Kabupaten Sukahrjo.

Hasil penelitiannya sebagai berikut : DAS Bengawan Solo dibagi menjadi SUB DAS yang meliputi SUBDAS Bengawan Solo Hulu, SUBDAS Kali Madiun, dan SUBDAS Bengawan Solo Hilir lalu dikualifikasikan menjadi mutu air yang dibagi menjadi 4 (empat). Das Bengawan Solo dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar yang menjadi sumber pencemaran sungai Bengawan Solo adalah hampir 80% limbah domestik yang sebagian besar berasal dari air cucian, industri non formal dan juga pemakaian bahan kimia untuk keperluan pertanian sisanya dari limbah rumah sakit,



hotel dan industri besar. Dalam mengatasi pencemaran sungai, BLH gencar mengedukasi masyarakat, setelah itu tahap pengendalian pencemaran dan kendala-kendala yang di hadapi Badan Lingkungan Hidup dalam pengendalian pencemaran.

Berdasarkan ketiga skripsi tersebut yang telah dipaparkan di atas maka perbedaan antara penulisan hukum yang telah dijabarkan di atas dengan penulisan hukum penulis adalah pada skripsi pertama menjabarkan atau bertitik fokus pada pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir di Bantargebang yang dilakukan oleh Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota Bekasi. Pada skripsi kedua bertitik fokus menjabarkan mengenai rumah tinggal di sempadan sungai Code yang dalam hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta dan mengenai adanya rumah tinggal di sungai Code masih belum dapat melestarikan fungsi sungai Code itu sendiri. Skripsi ketiga menjabarkan mengenai peran Badan Lingkungan Hidup dalam pengendalian pencemaran di sungai Bengawan Solo yang pencemaran terjadi 80% dari limbah domestik dan kendala-kendala yang dihadapi adalah untuk melakukan pengendalian pencemaran itu sendiri. Sedangkan pada penulisan hukum yang akan dibuat perbedaannya adalah penulis membahas mengenai Aspek Hukum Perlindungan Sungai Ciliwung dari Pencemaran akibat Permukiman Liar yang dalam hal ini bagaimana peran masing-masing dinas yang terkait dalam penelitian untuk mampu mengatasi permasalahan perlindungan terhadap sungai Ciliwung, mencegah terjadinya pencemaran dan apabila sudah tercemar bagaimana pemulihannya yang diakibatkan dari adanya permukiman liar.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Aspek Hukum**

Aspek hukum yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah sudut pandang mengenai perlindungan sungai Ciliwung dari pencemaran akibat permukiman liar yang semestinya dijalankan berdasarkan pada Peraturan perUndang-Undangan yang telah mengaturnya atau yang berlaku.

### **2. Sungai**

Sungai sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air dari dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.

### **3. Pencemaran**

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi: pencegahan, penanggulangan, pemulihan.<sup>2</sup> Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu yang telah ditetapkan sebagaimana yang telah di atur dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

---

<sup>2</sup> Syamsul Arifin, 2012, *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, PT. Sofmedia, Medan, hlm. 80. Definisi tersebut sesuai dengan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

#### 4. Permukiman Liar

Jika sudah terjadi pencemaran maka yang akan dibahas dalam penulisan hukum peneliti lebih beritik tolak pada penanggulangan dan pemulihan yang diakibatkan dari adanya permukiman liar atau sering disamakan dengan permukiman kumuh yang dalam hal ini adalah permukiman yang tidak memenuhi standar suatu permukiman pada umumnya. Permukiman kumuh ini disebut permukiman liar (illegal) jika berada di bangunan-bangunan atau tanah-tanah milik negara misalnya: di sempadan sungai, di pinggir rel kereta api dan lain-lainnya yang menimbulkan pencemaran lingkungan dan pencemaran air sungai.<sup>3</sup> Permukiman liar dalam hal ini tidak memiliki izin atau status tanah tidak legal dan dapat di katakan sama dengan permukiman kumuh karena jika dilihat pada Pasal 110 ayat (3) huruf (a), dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menyatakan bahwa penilaian lokasi berdasarkan aspek legalitas tanah maka menghasilkan klarifikasi permukiman kumuh dengan status tanah legal dan status tanah tidak legal. Bangunan-bangunan yang dimaksudkan di sini adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 huruf x Peraturan Daerah Daerah Khusus Indonesia Nomor 7 Tahun 1991 tentang Bangunan dalam Wilayah Daerah Khusus Jakarta.

---

<sup>3</sup> <http://www.nonawinda.tk/2014/07/pemukiman-kumuh.html>, diakses tanggal 13 Oktober 2018.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian tentang Aspek Hukum Perlindungan Sungai Ciliwung dari Pencemaran akibat Permukiman Liar adalah penulisan hukum empiris. Pengertian dari penelitian hukum empiris itu sendiri adalah penelitian yang berfokus pada fakta sosial atau suatu analisis terhadap hasil penemuan kepustakaan telah dijelaskan secara singkat dan pada penelitian lapangan menghubungkan beberapa hasil penemuan-penemuan sosial.<sup>4</sup> Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada narasumber untuk memperoleh data primer serta data pendukung yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### **2. Sumber Data**

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber tentang objek yang diteliti sebagai bahan utama.
- b. Data sekunder terdiri atas:
  - 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum untuk penelitian Aspek Hukum Perlindungan Sungai Ciliwung dari Pencemaran akibat Permukiman Liar dengan menggunakan Peraturan perUndang-Undang meliputi:
    - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
    - b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, 1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Cet.1, IND – HILL – CO, Jakarta, hlm. 139-140.

- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai.
- g) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.
- h) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.
- i) Peraturan Daerah Daerah Khusus Indonesia Nomor 7 Tahun 1991 tentang Bangunan dalam Wilayah Daerah Khusus Jakarta.
- j) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 284 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.
- k) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 399 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Kebersihan Badan Air.
- l) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 274 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

m) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air.

2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang didapatkan melalui pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, majalah ilmiah, doktrin, asas-asas hukum, fakta hukum, data statistik dari instansi/lembaga resmi pemerintah, serta wawancara dari pejabat yang berkaitan dengan judul penelitian ini yaitu Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Satpol PP.

### 3. Cara pengumpulan data

a. Cara pengumpulan data primer dapat dilakukan dengan :

- 1) Wawancara dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan kepada narasumber secara langsung dan tepat untuk mendapatkan jawaban yang sesuai terkait dengan penelitian tentang Aspek Hukum Perlindungan Sungai Ciliwung dari Pencemaran akibat Permukiman liar dalam hal ini wawancara dilakukan dengan cara panduan wawancara agar tetap sesuai dengan topik.
- 2) Kuesioner sebagai alat riset atau survei yang terdiri atas serangkaian pertanyaan tertulis bertujuan untuk mendapatkan tanggapan dari kelompok orang yang terpilih mengenai objek penelitian.<sup>5</sup>

b. Cara untuk memperoleh data sekunder dapat dilakukan dengan studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer meliputi Peraturan

---

<sup>5</sup> Lihat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kuesioner, <https://kbbi.web.id/kuesioner>, di akses tanggal 13 Oktober 2018.

PerUndang-Undangan dan bahan hukum sekunder meliputi pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, majalah ilmiah, doktrin, asas-asas hukum, fakta hukum, data statistik dari instansi/ lembaga pemerintah, serta wawancara dari pejabat yang berkaitan.

#### 4. Responden dan Narasumber

##### a. Responden

Masyarakat Manggarai Utara RT. 01, RT. 02, RT. 03, RT. 04, RT. 05, RT. 06, RT. 07, RT.08, RT.09, RT.10, RT. 011, RT. 012, RT. 013, RT. 015, RT. 016, RT. 017 setiap RT di wakili 10 (sepuluh) orang yang mengisi kuesioner.

##### b. Narasumber

Bapak Lukman Dermanto, S.T., Kepala Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, Ibu Mustika Pusparini, S. Si., Staff Pemantauan Kualitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, Bapak Ir. Mudarisin., M.T., Kepala Bidang Pengawasan dan Penataan Hukum Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, Drs. H. Hizbullah, M.Si., Staff Teknis Ahli Seksi Pembinaan Penghunian Bidang Pembinaan dan Peran Serta Masyarakat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta, Bapak Lukman Haris, S. Sos., Kepala Seksi Pemerintah dan Kantip Kecamatan Tebet, dan Bapak Komarudin, S.IP., Kepala Satpol PP Kecamatan Tebet.

#### 5. Analisis Data

Cara yang akan digunakan dalam menganalisis data yaitu dengan menggunakan metode analisis data kualitatif berupa pendekatan pengolahan secara

mendalam mulai dari data hasil pengamatan, wawancara, dan data literatur.<sup>6</sup> Selanjutnya untuk penarikan kesimpulan menggunakan metode berpikir induktif yaitu dengan dilakukannya pengamatan terlebih dahulu setelah pengamatan selesai barulah ditarik kesimpulan atas pengamatan tersebut. Metode ini sering disebut dengan pendekatan pengambilan kesimpulan dari khusus menjadi kesimpulan umum.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Ayat Hidayat Huang, Metode Analisis Data, <http://www.en.globalstatistik.com/metode-analisis-data/>, diakses tanggal 24 Agustus 2018.

<sup>7</sup> Babyrosemarry Rosemarry, Pendekatan Indukti dan Deduktif <https://www.scribd.com/doc/194455646/Pendekatan-Induktif-Dan-Deduktif/>, diakses tanggal 24 Agustus 2018.